

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018- 2023



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

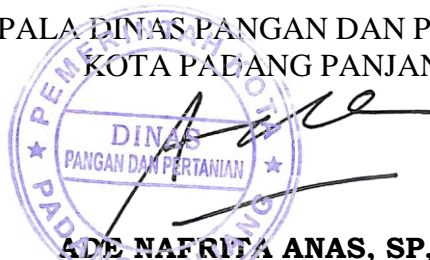
Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 telah dapat diselesaikan. Perubahan Renstra ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023 yang penyusunannya didasarkan juga pada kondisi dan aspirasi dari *stake holder* yang kesemuanya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam perencanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian di Kota Padang Panjang. Selanjutnya Perubahan Renstra yang telah tersusun ini akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang selama 5 tahun.

Ucapan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 ini dengan harapan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang Panjang, Desember 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PANJANG' around the perimeter and 'DINAS PANGAN DAN PERTANIAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

Pembina Utama Muda, NIP. 19710520 199903 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Provinsi	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII	PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dokumen rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada RPJMD Provinsi (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras sebagai jenis makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Sedangkan definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Karena itu, Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (food security), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu

dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (food resiliency); dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (food sovereignty).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bahkan kemandirian pangan adalah dengan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis sektor lain.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan amat berpengaruh terhadap keberadaan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan karakter daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, organisasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk urusan pangan dan pertanian yaitu Dinas Pangan dan Pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Padang Panjang. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka semua yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya diperlukan pula perubahan atau penyesuaian, diantaranya adalah Rencana Strategis Dinas yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan akan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Pertanian.

Memahami hal tersebut di atas maka dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang sudah disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terakhir yang ada di Kota Padang Panjang.

Dimana hal itu tetap merupakan suatu upaya yang terprogram dan sistematis serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan ditetapkannya perubahan RPJMD Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukanlah perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang perlu untuk melakukan penyesuaian berupa penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 guna mengakomodir berbagai perubahan kebijakan yang belum termuat dalam Renstra sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
2. Tersedianya dokumen yang mampu menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;

3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang; dan
4. Sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pangan dan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan bidang lain.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, yang merupakan jabaran dari visi dan misi Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Renstra Daerah Kota Padang Panjang;
2. Sebagai pedoman bagi pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskesmas pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

8. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

9. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

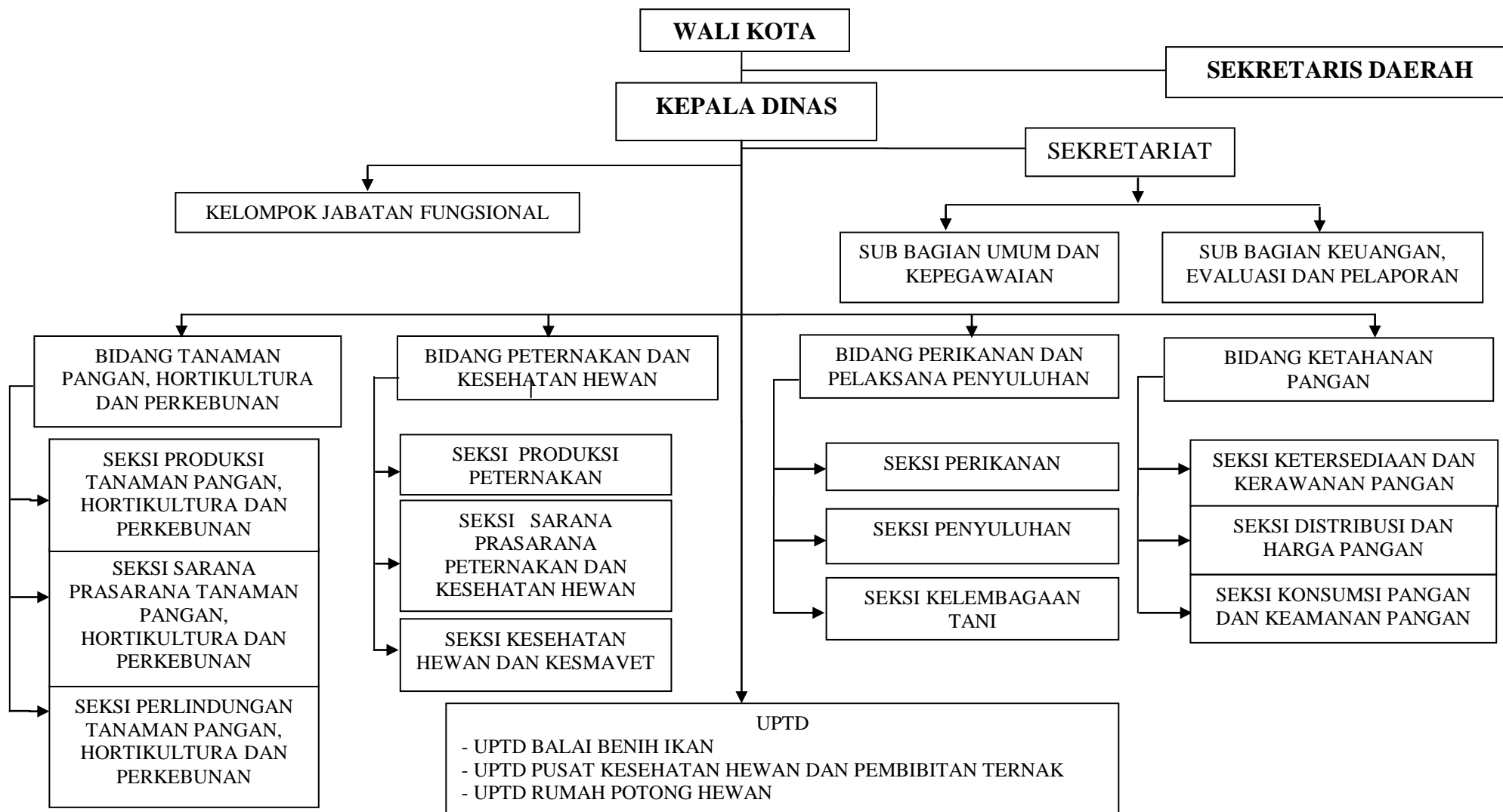
Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan								Jenis Kelamin		Jml		
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2	P	L	PNS	PPPK	THL	
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	7	26	7	1	-	18	2	1	45	4	33	39	10	4	27	
2	UPTD BBI	-	-	3	-	-	-	9	1	-	1	-	2	9	7	-	9	
3	UPTD Puskesmas	1	3	1	1	1	1	2	-	-	5	-	4	5	6	-	5	
4	UPTD RPH	-	1	2	-	0	1	7	1	1	3	-	2	10	14	-	6	
	Jumlah	1	11	32	8	2	2	36	4	2	54	4	41	63	52	4	47	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Berdasarkan data Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diatas jumlah PNS sebanyak 52 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan THL sebanyak 47 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada kepala seksi pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh kepala seksi yang bersangkutan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Transportasi

Jumlah kendaraan dinas untuk operasional, baik yang berada di Dinas Pangan dan Pertanian maupun pada UPTD Puskesmas, BBI dan RPH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Roda 4	Roda 3	Roda 2	Roda 6
1	Kantor Dinas Pangan dan Pertanian	5	1	38	-
2	UPTD BBI	-	1	3	-
3	UPTD RPH	1	-	4	1
4	UPTD Puskesmas	1	1	5	-
	Jumlah	7	3	51	1

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

b. Prasarana Gedung Kantor

1. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terletak di jalan Ahmad Yani No 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
2. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dibangun pada tahun 2011 dan terletak di kawasan RPH Kelurahan Silaing Bawah. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan laboratorium kesehatan hewan, fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan bibit sapi perah unggul melalui program Rearing Unit.
3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dengan luas 2 ha terletak di Kelurahan Silaing Bawah dan baru direnovasi pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. UPTD RPH ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pemotongan sesuai dengan standar dan sudah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pemotongan sesuai syariat islam.
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan luas 2 ha terletak di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk. Balai Benih Ikan ini sudah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk komoditas Ikan Nila serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium kualitas air, ruang pertemuan dan mess/tempat penginapan. Mess atau tempat penginapan memiliki 11 kamar dengan kapasitas huni sebanyak 44 orang yang digunakan untuk mendukung fungsi BBI sebagai pusat pelatihan perikanan dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum.
5. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Barat yang berlokasi di kawasan RPH Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Bawah.
6. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Timur yang berlokasi di ex. Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Ganting.

2.2.3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana

peningkatan produksi pertanian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Luas Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	552
2	Perkebunan	264
3	Perikanan	87

Sumber Data: Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 552 ha, perkebunan seluas 264 ha dan perikanan seluas 87 ha.

2.2.4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	140
2	Gabungan Kelompok Tani	17
3	Kelompok Perikanan	44

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2021

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 140 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 17 kelompok serta kelompok perikanan sebanyak 44 kelompok.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					-4	-5	1	2	-4	-5	1	2	-4	-5	1	2
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				85	85	85	85,25	84,1	85	80,20	85,60	98,94%	100%	94,35%	100,41%
2	Persentase Produksi Benih Perikanan (%)				100%	52,50%	-	-	73,92%	52,54%	-	-	73,92%	100,08%		
3	Persentase Produksi Ikan Konsumsi				100%	81,30%	-	-	96,08%	81,33%	-	-	96,08%	100,04%		
4	Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)				NA	1%	-	-	NA	28,78%	-	-	NA	28,78%		
5	Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun				NA	481.469 liter/tahun	-	-	NA	442.170 liter/tahun	-	-	NA	91,84%		
6	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian				5,58	5,67%	-	-	5,41	5,41%	-	-	96,95%	95,41%		
7	Produksi susu sapi				-	-	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	-	-	396.720 liter/tahun	326.206 liter/tahun			100,18%	78,79%
8	Pendapatan pembudidaya ikan				-	-	17.222.000 rupiah/tahun/RTP	18.083.100 /rupiah/tahun/RTP	-	-	20.187.640 rupiah/tahun/RT P	18.580.002 rupiah/tahun/RTP			117,22%	102,75%
9	Produksi padi				-	-	6.634 ton	6.750 ton	-	-	9.810,6 ton	8.557 ton			147,88%	126,77%
10	Persentase terbentuknya klaster tanaman hias				-	-	5%	25%	-	-	5%	5%			100,00%	20,00%
11	Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos				-	-	2%	8%	-	-	0	10%			0,00%	125,00%
12	Meningkatnya pendapatan petani				-	-	10%	20%	-	-	10%	24%			100,00%	120,00%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam untuk tahun 2017-2018 dan 7 macam untuk tahun 2019-2020, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran persentase produksi benih perikanan adalah Jumlah produksi benih ikan (ekor) bagi target daerah (ekor) kali seratus persen.
3. Cara pengukuran persentase produksi ikan konsumsi adalah jumlah ikan konsumsi (ton) bagi target daerah (ton) kali seratus persen.
4. Cara pengukuran persentase produktivitas sektor pertanian adalah selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali seratus persen.
5. Cara pengukuran peningkatan produksi rata-rata susu per tahun adalah jumlah produksi susu keseluruhan dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian adalah Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali seratus persen.
7. Cara pengukuran produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/tahun
8. Cara pengukuran pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan dikali harga ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan)
9. Cara pengukuran produksi padi adalah jumlah produksi padi per tahun

10. Cara pengukuran persentase terbentuknya kluster tanaman hias adalah progress tahapan pembentukan kluster tanaman hias, yaitu:
 - Tahap 1 (5%) = perencanaan
 - Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana
 - Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan SDM petugas dan petani
 - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya kluster tanaman hias
11. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos adalah pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
12. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Produktivitas Sektor Pertanian

Capaian Persentase Produktivitas Sektor Pertanian pada Tahun 2018 sebesar -28,78% dengan persentase capaian sebesar -2.878%. Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 4,5 ton/ha angka sementara data dari Badan Pusat Statistik, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 6,4 ton/ ha. Target indikator kinerja persentase produktivitas sektor pertanian tahun 2018 ditargetkan naik 1% dari produktivitas padi tahun lalu.

2. Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun

Capaian peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 sebesar 442.170 liter/tahun dengan persentase capaian sebesar 91,84%. Indikator peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 ditergetkan 481.469 liter/tahun.

Indikator Kinerja Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian/ perkebunan tidak mencapai target tahun ke lima rencana strategis, dengan masalah sebagai berikut:

Hambatan/ masalah:

1. Menurunnya Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman pangan (padi) karena : adanya perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh yang sempit membuat jadwal tanam tertunda selama delapan bulan (Januari-Agustus) di Kelurahan Ekor Lubuk Kelompok Tani Simbaru.
2. Adanya serangan hama tikus seluas 79,5 ha, hama kresek 1,9 ha dan Blast 6 ha sepanjang tahun.
3. Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi perkantoran, perumahan, tempat ibadah dan sebagainya.
4. Berkurangnya populasi sapi perah dikarenakan beberapa peternak melakukan penjualan sapi karena kesulitan pemasaran.
5. Daya serap pasar yang terbatas terhadap produk susu sehingga menimbulkan kurangnya animo peternak sapi perah untuk menambah atau meningkatkan populasi ternaknya.
6. Masih tinggi biaya operasional produksi sapi perah dimana salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pakan.

Strategi pemecahan masalah:

1. Perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh.
2. Adanya himbuan kegiatan Gerakan Berburu Tikus di Kota Padang Panjang, serta adanya bantuan sarana penangkapan hama tikus seperti racun tikus dan sebagainya. Kemudian perlu dilakukan upaya budidaya tanaman sehat sehingga bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit melalui penerapan teknologi budidaya penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang dan pengendalian hama dan penyakit.
3. Penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang Panjang.
4. Meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran susu sapi serta melakukan diversifikasi olahan susu.
5. Melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan semen beku sexing untuk meningkatkan kelahiran anak sapi perah betina.

6. Perlunya sentral pakan penyediaan bahan baku pakan untuk ternak sapi perah sehingga bisa menekan biaya operasional.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.748.690.750	2.645.278.400	2.658.039.400	2.009.279.650	2.435.253.720	2.161.163.127	2.233.669.761	1.829.552.653	88,60	81,70	84,03	91,06	8.554.328.463	7.287.474.771
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000,00	3.927.000,00	4.500.000		3.570.000	3.927.000	4.425.000		100,00	100,00	98,33		11.997.000	11.922.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.880.000	121.020.000	183.420.000		108.993.841	93.933.457	136.376.944		65,71	77,62	74,35		470.320.000	339.304.242
Kegiatan Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	493.469.585	567.354.900	545.126.900	390.157.700	382.568.499	369.473.357	368.660.821	305.571.915	77,53	65,12	67,63	78,32	1.703.490.810	1.197.095.656
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.700.000				87.975.000				81,69				107.700.000	87.975.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	950.478.965	764.614.000	620.524.000	230.546.000	872.164.905	610.298.935	576.063.877	228.785.518	91,76	79,82	92,84	99,24	2.393.253.465	2.115.724.097
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.010.000	29.000.000	43.500.000		43.520.000	28.986.500	43.265.400		98,89	99,95	99,46		116.510.000	115.771.900
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.267.500	52.340.000	46.579.500	48.770.000	28.485.550	37.797.600	32.777.500	45.721.350	76,44	72,22	70,37	93,75	148.379.500	110.490.988
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.675.000	16.000.000	15.500.000	154.650.000	11.894.300	15.744.850	15.467.500	129.415.557	93,84	98,41	99,79	83,68	82.837.500	75.460.539
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	96.780.000	47.250.000	67.200.000	19.250.000	73.789.000	44.813.700	47.890.500	18.125.210	76,24	94,84	71,27	94,16	216.042.500	171.024.503
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	347.000.000	498.771.500	485.725.000	140.029.750	345.672.553	497.988.543	434.043.988	131.668.690	99,62	99,84	89,36	94,03	1.366.503.938	1.310.622.257
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	489.859.700	545.001.000	645.964.000	1.025.876.200	476.620.072	458.199.185	574.698.231	970.264.413	97,30	84,07	88,97	94,58	1.937.293.750	1.752.083.591
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	162.563.548	252.684.000	152.934.000	93.140.000	113.828.500	266.592.210	116.919.000	87.964.000	69,01	88,84	76,45	94,44	591.466.548	519.330.710
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.700.000	103.650.000			22.680.000	98.410.300			91,82	94,94			128.350.000	121.090.300
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	40.000.000	65.000.000	95.000.000	31.140.000	39.260.000	64.642.650	85.059.050	26.030.000	98,15	99,45	89,54	83,59	207.785.000	195.469.200
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.670.000	74.034.000	52.934.000		48.608.500	49.843.500	30.493.750		78,82	67,33	57,61		188.638.000	128.945.750
Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	36.193.548	10.000.000	5.000.000		1.640.000	6.695.760	1.366.200		4,53	66,96	27,32		51.193.548	9.701.960

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	47.400.000		62.000.000	1.640.000	47.000.000		61.934.000		99,16		99,89	62.900.000	64.123.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	30.000.000	50.000.000		18.000.000	9.100.000	42.868.000		60,00	30,33	85,74		110.000.000	69.968.000
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30.000.000	30.000.000	50.000.000		18.000.000	9.100.000	42.868.000		60,00	30,33	85,74		110.000.000	69.968.000
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	591.000	649.800	799.800		405.000	649.800	719.000		68,53	100,00	89,90		2.040.600	1.773.800
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.000	129.700	499.900		87.500	129.700	467.000		74,15	100,00	93,42		747.600	684.200
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	140.000	154.000			100.000	154.000			71,43	100,00			294.000	254.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100.000	133.100			100.000	133.100			100,00	100,00			233.100	233.100
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	233.000	233.000	299.900		117.500	233.000	252.000		50,43	100,00	84,03		765.900	602.500
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	72.721.850	333.812.500	867.012.800	101.905.000	207.847.450	299.907.645	791.066.029	101.199.375	93,66		91,24	99,31	1.299.023.400	1.324.120.968
Kegiatan Penyusunan Sumber Pangan Alternatif			203.800.000				190.855.350				93,65		203.800.000	190.855.350
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	21.237.500	84.897.500	199.735.000	58.630.000	20.178.000	82.060.000	180.736.246	58.000.500	95,01		90,49	98,93	320.527.500	297.474.371
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	121.850	108.600.000	45.575.000		113.204.700	89.220.795	40.742.500		92,90	82,16	89,40		154.296.850	243.167.995
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	23.972.500	114.415.000			23.021.000	109.919.800			96,03	96,07			138.387.500	132.940.800
Kegiatan Analisis Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	27.390.000	18.450.000	7.025.000		25.721.875	12.758.000	6.197.500		93,91	69,15	88,22		52.865.000	44.677.375
Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok		7.450.000	10.612.500	2.350.000	25.721.875	5.949.050	9.505.250	2.287.000		79,85	89,57	97,32	18.650.000	41.747.925
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			33.235.000	40.925.000			29.040.300	40.911.875			87,38	99,97		
Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan			58.235.000				47.574.500				81,69			
Penanganan Daerah Rawan Pangan			27.374.800				25.505.000				93,17			
Analisis Ketersediaan Pangan			12.700.000				11.649.500				91,73			

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian			109.870.500				109.870.500				100,00			
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija			20.000.000				7.434.250				37,17			
Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan			138.850.000				131.955.133				95,03			
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	236.100.000	1.216.748.000	580.839.000	599.973.000	428.173.517	532.475.000	506.577.487	596.299.250	98,12		87,21	99,39	2.183.680.250	1.616.300.817
Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	36.900.000	72.700.000	65.930.000		35.169.517	283.850.000	60.380.550		95,31		91,58		175.530.000	379.400.067
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	199.200.000	353.980.000	114.500.000	99.685.000	196.502.000	62.038.000	109.210.000	98.799.500	98,65	17,53	95,38	99,11	692.601.250	392.449.875
Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)		790.068.000	400.409.000	500.288.000	196.502.000	186.587.000	336.986.937	497.499.750		23,62	84,16	99,44	1.315.549.000	844.450.875
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	360.040.125	210.999.000	74.599.800		304.244.305	137.246.650	65.877.450		84,50		88,31		645.638.925	507.368.405
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	252.827.625	144.323.000	74.599.800		215.468.505	98.010.150,00	65.877.450		85,22	67,91	88,31		471.750.425	379.356.105
Kegiatan Optimalisasi Kemampuan Komisi Penyuluh	82.012.500				65.172.700,00				79,47				82.012.500	65.172.700
Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	25.200.000	66.676.000			23.603.100,00	39.236.500,00			93,66	58,85			91.876.000	62.839.600
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	700.155.000	586.064.000			508.265.000	728.585.350			72,59				1.286.219.000	1.236.850.350
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	345.030.000	26.705.000			213.276.650	20.390.750			61,81	76,36			371.735.000	233.667.400
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	135.600.000				131.765.850				97,17				135.600.000	131.765.850
Kegiatan DAK Pertanian	144.000.000	559.359.000			144.000.000	550.959.100			100,00	98,50			703.359.000	694.959.100
Kegiatan Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	75.525.000	-			19.222.500	-			25,45				75.525.000	19.222.500
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan		168.598.000				157.235.500				93,26			168.598.000	157.235.500

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	736.000.000	164.360.000	1.775.288.000	-	607.822.700	156.340.250	1.677.193.370	-	82,58	95,12	94,47		2.675.648.000	2.441.356.320
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	288.450.000	65.175.000	61.560.000		192.876.950	61.557.250	56.341.370		66,87	94,45	91,52		415.185.000	310.775.570
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	393.435.000	99.185.000			367.091.250	94.783.000			93,30	95,56			492.620.000	461.874.250
Kegiatan Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	54.115.000				47.854.500				88,43				54.115.000	47.854.500
DAK Bidang Pertanian			1.713.728.000				1.620.852.000				94,58			
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				234.074.900	-			232.540.036				99,34	58.518.725	58.135.009
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan				93.674.900				93.183.886				99,48	23.418.725	23.295.972
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pertanian				9.100.000				8.660.800				95,17	2.275.000	2.165.200
Kegiatan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah				3.300.000				2.754.800				83,48	825.000	688.700
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan				125.000.000				124.940.550				99,95	31.250.000	31.235.138
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna				3.000.000				3.000.000				100,00	750.000	750.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	90.277.450	31.475.000			82.573.950	28.822.900			91,47	91,57			121.752.450	111.396.850
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	69.500.000	31.475.000			66.763.500	28.822.900			96,06	91,57			100.975.000	95.586.400
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	20.777.450				15.810.450				76,09				20.777.450	15.810.450
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian				7.598.850				7.598.850				100,00		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1	2	Anggaran	Realisasi
	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020	-2017	-2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat				7.598.850				7.598.850				100,00	1.899.713	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	322.425.000	272.804.000	300.065.000	231.670.000	298.422.700	235.790.850	258.912.100	226.660.100	92,56	86,43	86,29	97,84	953.211.500	849.790.675
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	322.425.000	272.804.000	300.065.000	231.670.000	298.422.700	235.790.850	258.912.100	226.660.100	92,56	86,43	86,29	97,84	953.211.500	849.790.675
Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	1.738.115.000	2.162.286.000	1.886.274.800	432.491.100	932.991.575	1.978.407.407	1.498.754.703	397.758.250	53,68	91,50	79,46	91,97	5.894.798.575	4.509.593.248
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak	723.760.000	1.071.715.000	813.009.000	353.425.000	670.679.375	991.118.157	671.659.453	352.569.150	92,67	92,48	82,61	99,76	2.696.840.250	2.421.599.273
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	-	290.644.000	457.395.300		-	280.938.500	317.811.500			96,66	69,48		748.039.300	598.750.000
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.014.355.000	48.900.000	69.780.500	2.000.000	262.312.200	27.846.750	64.306.750	1.926.750	25,86	56,95	92,16	96,34	1.133.535.500	354.947.388
Kegiatan Sarana dan Prasarana Peternakan		751.027.000	546.090.000	77.066.100	262.312.200	678.504.000	444.977.000	43.262.350		90,34	81,48	56,14	1.316.383.525	1.396.608.788

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain;
4. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/ hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

2.4.2 Peluang

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 3.119,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 176 hari dalam setahun, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat berkembang dengan baik;
3. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,15 %). (sumber PPDA tahun 2021);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;

6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah dan tanaman hias.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pangan dan Pertanian, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal	1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	1. Keterbatasan kemampuan ekonomi 2. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi) 3. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum 4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
2.	Menurunnya jumlah populasi ternak	1. Masih rendahnya produksi susu sapi 2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak karena tingginya biaya produksi	1. Belum optimalnya pemasaran dan pengolahan hasil produksi susu sapi 2. Masih tingginya angka kematian ternak

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya penerapan teknologi pasca panen peternakan 4. Belum semua produk olahan susu memiliki izin edar 5. Masih adanya indukan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.	Rendahnya Pendapatan Petani Ikan pada Usaha Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan 2. Rendahnya kualitas SDM Petani Ikan dalam Budidaya Ikan 3. Belum Adanya Penghasil Pakan Ikan dengan Harga yang Terjangkau
4.	Rendahnya Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Rendahnya Produktivitas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Lahan untuk Pemukiman dan sarana lainnya 2. Berkembangnya Hama Penyakit Tanaman 3. Petani Kebanyakan Penggarap 4. Kurangnya SDM Petani yang Mengelola Kelembagaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Belum diterapkannya budidaya tanaman sehat 6. Belum Optimalnya Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani.
5.	Rendahnya pendapatan petani peternak	1. Masih tingginya angka kemiskinan peternak	1. Belum optimalnya SDM peternak 2. Tingginya biaya produksi 3. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2021

5.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Padang Panjang adalah “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT” yang di dukung oleh 3 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif.

Dinas Pangan dan Pertanian mendukung Misi ke satu yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tujuan 1) meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan; 2) menurunnya angka kemiskinan; 3) meningkatnya pendapatan masyarakat dan 4) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran 1) meningkatnya produksi pertanian dan perikanan; 2)

meningkatnya pendapatan petani penerima bantuan sosial; 3) meningkatnya pendapatan petani dan 4) menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan. Dengan strategi 1) Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya; 2) peningkatan pendapatan pembudidaya ikan; 3) peningkatan produksi padi; 4) peningkatan persentase terbentuknya klaster tanaman hias; 5) fasilitasi peningkatan pendapatan petani penerima bansos; 6) pemakaian teknologi di bidang pertanian dan 7) Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi sektor pangan.

Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian yang mendukung secara langsung Program Walikota Padang Panjang “Gerakan Warga Berdaya Kota Berjaya (Pemanfaatan pekarangan dan lingkungan menanam bunga, sayur, buah, pohon, beternak, berkolam, industri rumah tangga)” adalah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

5.2. Telaahan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketahanan pangan dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat;
3. Meningkatnya keamanan pangan;
4. Meningkatnya stabilisasi harga pangan pokok dan strategis;
5. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Dinas Pangan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;
2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;
4. Pemberdayaan daerah rentan pangan;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
6. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pangan menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;
2. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat;
4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
6. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
8. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
9. Pengawasan peredaran sarana pertanian
10. Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan
11. Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3 : Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.1. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	- Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
		1.2. Pemberdayaan daerah rentan pangan	- Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
	1.2 Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	- Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
			- Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal

	1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan	3.1 Peningkatan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; - Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen - Pengawasan peredaran sarana pertanian - Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan - Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
	1.4 Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan strategis (Akses Pangan)	4.1 Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau. - Subsidi harga terhadap pangan pokok strategis

Sumber : Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan petani yang diturunkan ke dalam sasaran meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga menetapkan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang

melayani dimana tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatnya tata kelola organisasi.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada
 - b. pelaku utama dalam berusaha tani
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - d. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - e. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - f. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta
 - g. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - h. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - i. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
 - j. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - k. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan
 - l. dan hortikultura
 - m. j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku
 - n. utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - o. k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian;
 - b. Mendorong tumbuh petani milenial;
 - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian.
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses permodalan
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c. Peningkatan pengawasan agroinput
 - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Pengembangan jaringan produk pertanian
 - f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g. Pengintergrasian program pertanian

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuhnya petani milenial 3. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah yang baik	1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD 2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan 3. Penatausahaan Keuangan OPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026

Adapun Indikaor Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi perkebunan :								
			- Kakao	%	1	1	1	1	1	1	
			- Karet	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kopi	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kelapa Sawi	%	1	1	1	1	1	1	
			- Kelapa	%	1	1	1	1	1	1	
			- Gambir	%	1	1	1	1	1	1	
			Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan :								
			- Padi	%	2	2	2	2	2	2	
			- Jagung	%	3	3,2	3,5	3,6	3,8	3,9	
			Persentase peningkatan produksi Hortikultura :								
			- Cabe	%	2	2	2	2	2	2	
			- Bawang merah	%	2	2	2	2	2	2	
- Manggis	%	2	2	2	2	2	2				
- Jeruk	%	1	1	1	1	1	1				
II	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	71	74	75	76	77	78	

Sumber : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka visi dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: "Sumbar Pusat Pangan Asal Hewani Sumatera Bagian Tengah"

Visi tersebut mengandung kata kunci sbb:

Pusat Pangan Asal Hewan adalah

1. Sumatera Barat sebagai produsen ternak (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi : Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur
2. Pangan Asal Hewan adalah produk yang dihasilkan oleh ternak berupa daging, telur dan susu.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi SKPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

"Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal".

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan adalah:

"Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan".

Sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak;
2. Meningkatnya status kesehatan hewan; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.5 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat	Persen Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.75
		2.Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,6	0,4	0,3	0.2	0.1	0.1
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95

Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	1. Meningkatkan produksi pangan asal ternak	Ekstensifikasi (mengembangkan) dan intensifikasi (meningkatkan) kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
			2. Meningkatkan perbibitan sapi lokal berbasis kawasan dan kelompok peternak
			3. Memperluas dan mengembangkan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas
			4. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
			5. Merekomendasi penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensinya
			6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan 8. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan 9. Meningkatkan pengendalian gangguan reproduksi pada ternak sapi 10. Peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
	2.Meningkatnya status kesehatan hewan	a.Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Brucellosis b. Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	1. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota & Puskesmas) 2. Meningkatkan Surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan 1. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis 2. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas). 3. Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 4. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana dan Bahan Medik 5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit – Unit Pelayanan Kesehatan Hewan & Kesmavet 6. Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis 7. Pemberdayaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner 8. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			veteriner.
			9. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner
			10. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO).
			11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti
			12. Pengembangan media informasi di bidang kesehatan hewan melalui pengembangan website dan jenis-jenis media informasi lainnya
			13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular
	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan organisasi melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi,tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitasi kinerja	1. Meningkatkan budaya kinerja aparatur
			2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
			3. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		b. Organisasi, peningkatan pengawasan,	1. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
			2. Peningkatan diklat bagi aparatur
			3. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.
			4. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
		b. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan
			2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan
		c. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi	1. Peningkatan kualitas basis data perencanaan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis nilai – nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluratistis, bersifat terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin serta material dan spiritual.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian serta tersedianya prasarana publik terkait infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana

pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

TUJUAN

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya kinerja organisasi.

SASARAN

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan indikator:
 - a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun 2021.
 - b. Pendapatan Pembudidaya ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/Thn pada tahun 2021.
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan(SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator :
 - a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80% pada tahun 2021.
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan
 - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar pada tahun 2021.
 - b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021.
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi :
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A.
 - b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sampai dengan tahun 2021 : sebesar > 95%.

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan Pendapatan pelaku usaha perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan	Rp/org/th	24.000.000	33.600.000	34.800.000	36.000.000	37.200.000	38.400.000
			- Jumlah pendapatan pembudidaya ikan	Rp/org/th	38.400.000	40.800.000	43.200.000	45.000.000	47.400.000	49.800.000
		2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	%	52	57	58	70	75	80
			3. Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	146,3	147,76	149,24	150,73	152,24
		- Konsumsi Ikan		Kg/kap/th	36,41	36,53	36,63	37	38	39
		2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	BB	BB	BB
- Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%				≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

Dokumen Acuan : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th		- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th
			Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
		c. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
			- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8 Permasalahn Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Budidaya	Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat. 2. Perkembangan pembangunan makin meningkat yang mengakibatkan alih fungsi lahan 3. .Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Masih Belum Optimal. 2. Kebutuhan Atas Pangan Yang Semakin Meningkat. 3. Adanya Perda No 2. Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang beserta turunannya 4. Intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi baru

Hasil Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hasil analisa dan rekomendasi KLHS mulai dari penyusunan isu strategis sampai ke penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Beberapa rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan perubahan renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ringkasan telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam skema berikut :

Tabel 3.9
Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
IV	Kemandirian Daerah	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	<p>Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian:</p> <p>Arah Kebijakan Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias Peningkatan produksi sub sektor peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Sumber Data: KLHS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. ASPEK TEKNIS

- a. Belum beragamnya pola konsumsi pangan
- b. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- c. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
- e. Rendahnya aspek kepemilikan lahan karena sebagian besar petani adalah petani penggarap.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Fluktuasi harga pangan;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian;
- c. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- d. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan
- e. Rendahnya pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan;
dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan;
2. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Petani;
4. Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan

Dengan Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023

RENSTRA AWAL										RENSTRA PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		3,05%	3,17%	3,3%	3,43%	3,56%	1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun t-1 ke tahun t	3,65%	1,29%	2,56%	2,74%	3,41%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	85	85,25	85,5	85,75	86										
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	Jumlah produksi susu sapi/ tahun	396.000 liter/ tahun	414.000 liter/ tahun	432.000 liter/ tahun	450.000 liter/ tahun	468.000 liter/ tahun			Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	Jumlah produksi susu sapi/ tahun (liter/tahun)	-	-	293.687	-	-
			Pendapatan Pembudidaya Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	17.222.000 Rp/ Th/RTP	18.083.100 Rp/ Th/RTP	18.987.255 Rp/ Th/RTP	19.936.618 Rp/ Th/RTP	20.933.449 Rp/ Th/RTP				Produktivitas Susu Sapi	Rata-rata jumlah susu sapi (liter/ ekor/ hari)	-	-	-	11,2	11,8
			Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7.216 ton	7.448 ton				Pendapatan Pembudidaya Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang) (Rp/ Th/RTP)	-	-	18.987.255	-	-
			Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias: - Tahap 1 (5%) = Perencanaan - Tahap 2 (25%) = Penyediaan sarana dan prasarana - Tahap 3 (50-75%) = Lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias	5%	25%	50%	75%	100%				Angka Konsumsi Ikan	Jumlah Ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk (kg/orang/tahun)	-	-	-	35	36
													Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun (ton/ha)	-	-	6.983	-	-
													Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	-	-	-	6,3	6,4
													Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias (%)	-	-	50	100	100
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan		Angka Kemiskinan	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan di wilayah tertentu	5,45	5,03	4,60	4,18	3,75	2.	Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan di wilayah tertentu	5,60%	5,24%	5,92%	5,79%	5,65%

RENSTRA AWAL										RENSTRA PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i (Q_i + Q_i - 1)}{2}$ dimana: p_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i Nilai G berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24				Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i (Q_i + Q_i - 1)}{2}$ dimana: p_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i Nilai G berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	0,322	0,394	0,309	0,308	0,307
		Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali 100 persen	2%	8%	10%	11%	12%			Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100% (%)	-	-	10	11	12
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39	3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	11,01	10,73	10,87	10,92	11,11
		Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	kenaikan 10 persen dari pendapatan petani/tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurangi biaya produksi	10%	20%	30%	40%	50%			Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurangi biaya produksi (%)	-	-	30%	40%	50%
										4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi stunting	Persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	19,5	17,03	16,52	15,51	13,98
											Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	-	-	85,5	85,75	86	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Tujuan Pertama yang ditetapkan adalah meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan. Sasaran dari tujuan pertama adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Adapun yang menjadi indikator sasarannya adalah produksi susu sapi dengan target 396.000 liter/tahun pada tahun 2019, 414.000 liter/tahun pada tahun 2020, 293.687 liter/tahun pada tahun 2021, kemudian untuk tahun 2022 sampai dengan 2023, indikator sasaran dari tujuan pertama ini mengalami perubahan menjadi produktivitas susu sapi dengan target 11,2 liter/ekor/hari pada tahun 2022 dan 11,8 liter/ekor/hari pada tahun 2023. Rata-rata produksi susu sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari. Upaya untuk peningkatan produksi susu sapi ini sangat didukung oleh ketersediaan bibit unggul, penyediaan pakan, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknik pengolahan dan pemasaran susu.

Begitu juga dengan indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2019, 18.083.100 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2020, 18.987.255 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, indikator sasaran pendapatan pembudidaya ikan ini mengalami perubahan menjadi Angka Konsumsi Ikan dengan target pada tahun 2022 adalah 35 kg/orang/tahun dan tahun 2023 36 kg/orang/tahun. Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk. Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 5,14 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

Kemudian indikator kinerja produksi padi yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 6.634 ton pada tahun 2019, 6.750 ton pada tahun 2020, 6.983 ton pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, indikator produksi padi ini mengalami perubahan menjadi produktivitas padi dengan target 6,3 ton/ha pada tahun 2022 dan 6,4 ton/ha pada tahun 2023. Upaya peningkatan produktivitas padi tersebut di atas dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

Indikator kinerja persentase terbentuknya klaster tanaman hias yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 5 % pada tahun 2019, 25% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, 100% pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2023. Tanaman Hias merupakan komoditi unggulan di Kota Padang Panjang yang sangat potensi untuk dikembangkan dilihat dari segi agropedoklimat yang mendukung dan letak Kota Padang Panjang yang strategis. Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013. Terbentuknya Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) Kota Padang Panjang tanggal 5 Juni 2018 sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Tanaman Hias di Kota Padang Panjang. Pembentukan klaster bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman hias, peluang pasar dengan mengembangkan konsep agrowisata untuk kesejahteraan petani tanaman hias di Kota Padang Panjang.

Tujuan kedua yang ditetapkan adalah Menurunnya Angka Kemiskinan. Sasaran dari tujuan kedua adalah meningkatnya pendapatan petani penerima bansos, dengan indicator sasaran adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut dari 2% pada tahun 2019, 8% pada tahun 2020, 10 % pada tahun 2021, 11 % pada tahun 2022 dan 12 % pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan meningkatnya bantuan sosial setiap tahunnya baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi dan Dana APBN.

Tujuan ketiga yang ditetapkan adalah Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya pendapatan petani dan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut sekitar

10% pada setiap tahunnya. Pendapatan petani diutamakan komoditinya adalah padi karena luas lahan sawah adalah 630 Ha dengan pendapatan awal sebesar Rp.2.000.000/bulan/ha. Untuk menunjang peningkatan pendapatan petani adalah dengan menerapkan teknologi di bidang pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia Petani. Pada sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan) terdaftar petani yang bergerak di bidang pertanian sebanyak 2.344 orang di Kota Padang Panjang.

Tujuan keempat yang ditetapkan adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasarannya adalah adalah menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan. Adapun yang menjadi indikator sasarannya adalah Skor Pola Pangan Harapan. Pada Tahun Pertama Renstra (tahun 2019), nilai skor pola pangan harapan 85, untuk 5 (lima) tahun kedepan ditargetkan jumlah skor pola pangan harapan akan bertambah sebanyak 85,25 pada tahun 2020, 85,5 skor pada tahun 2021, 85,75 skor tahun 2022 dan 86 skor tahun 2023. Saat ini konsumsi pangan padi-padian, minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang terlihat dari skor AKE yang melebihi skor maksimum. Sementara konsumsi terhadap pangan umbi-umbian, pangan hewani dan gula masih dibawah yang dianjurkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Bedasarkan pengertian dari strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan potensi yang ada sebagaimana pada tabel berikut ini:

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

RENSTRA AWAL				RENSTRA PERUBAHAN			
VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat				: Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah da Bermartabat			
MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan				: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan	1.Strategi 1.2 Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	1.Arah Kebijakan 1.1 Fasilitasi Pemanfaatan lahan pekarangan	Tujuan 1 Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan			
			2.Arah Kebijakan 1.2 Fasilitasi Pengolahan Pangan lokal dan pemanfaatan teknologi				
	2.Sasaran 2.1 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	2.Strategi 2.1 Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya	1.Arah Kebijakan 2.1 Pembinaan peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan		1.Sasaran 1.1 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1.Strategi 1.1 Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya	1.Arah Kebijakan 1.1 Pembinaan peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan
			2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen				2.Arah Kebijakan 1.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen
			3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani				3.Arah Kebijakan 1.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani
			2.Strategi 2.2 Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan				1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi penyediaan benih unggul
			2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen perikanan				2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen perikanan
			3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Perikanan				3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Perikanan
			4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran				4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.Strategi 2.3 Peningkatan Produksi Padi	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi budidaya pertanian 2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi penyediaan benih unggul 3.Arah Kebijakan 2.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani dan Petugas			3.Strategi 1.3 Peningkatan Produksi Padi	1.Arah Kebijakan 3.1 Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi budidaya pertanian 2.Arah Kebijakan 3.2 Fasilitasi penyediaan benih unggul 3.Arah Kebijakan 3.3 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani dan Petugas
		2.Strategi 2.4 Peningkatan Persentase Terbentuknya Kluster Tanaman Hias	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tanaman hias 2.Arah Kebijakan 2.2 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan (Asosisasi Petani Tanaman Hias)			4.Strategi 1.4 Peningkatan Persentase Terbentuknya Kluster Tanaman Hias	1.Arah Kebijakan 4.1 Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tanaman hias 2.Arah Kebijakan 4.2 Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan (Asosisasi Petani Tanaman Hias)
Tujuan 2 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	1.Sasaran 2.1 Strategi 2.1 Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bantuan Sosial	1.Strategi 2.2 Memberikan Bantuan Ternak Sesuai Permintaan Calon Penerima Bansos 2.Strategi 2.2 Pembinaan dan Evaluasi perkembangan penerima bantuan sosial	1.Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi Peningkatan pendapatan petani penerima Bantuan sosial	Tujuan 2 Menurunnya Angka Kemiskinan	1.Sasaran 2.1 Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bantuan Sosial	1.Strategi 1.1 Fasilitasi peningkatan pendapatan petani penerima bansos	1.Arah Kebijakan 1.1 Memberikan Bantuan Ternak Sesuai Potensi Calon Penerima Bansos dan melakukan monitoring/evaluasi
Tujuan 1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3.Sasaran 1.1 Meningkatnya Pendapatan Petani	1.Strategi 1.1 Pemakaian Teknologi di Bidang pertanian	1.Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dalam Penggunaan Teknologi Pertanian	Tujuan 3 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tujuan 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.Sasaran 3.1 Meningkatnya Pendapatan Petani Sasaran 4.1. Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	1.Strategi 1.1 Pemakaian Teknologi di Bidang pertanian 1. Strategi 1.1. Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi sektor pangan	1.Arah Kebijakan 1.1 Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dalam Penggunaan Teknologi Pertanian 1. Arah kebijakan 1.1. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan 2.Arah Kebijakan 1.2 Optimalisasi pengawasan keamanan pangan 3.Arah Kebijakan 1.3 Fasilitasi Penanganan kerawanan pangan

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program perubahan renstra tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dilakukan pemutakhiran pada tahun 2020 yaitu dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada tabel Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

1. RENSTRA AWAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan				1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun rencana/ PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun sebelumnya kali 100 persen	%	2,79	3,05		3,17		3,3		3,43		3,56		3,56		Dinas Pangan dan Pertanian	Kota Padang Panjang
	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan			1. Skor Pola Pangan Harapan	-% AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 - Skor AKE = % AKE x Bobot - Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal. Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal. Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok	index	85	85		85,25		85,5		85,75		86		86			
			1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	- Persentase angka kecukupan energi (AKE) - Persentase angka kecukupan protein (AKP)	Ketersediaan energi dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu Ketersediaan protein dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu	%	97,83	100	882.304.800	100	688.000.000	100	717.500.000	100	650.850.000	100	658.685.000	100	3.597.339.800		
			1.1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Jumlah uji sampel keamanan pangan yang dilaksanakan		kali	1	1	52.525.000	2	65.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	12	342.525.000		
			1.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Suplay Pangan	- Jumlah buku pola pangan harapan yang disusun		buku	10	10	10.000.000	0		0		0		0		10	10.000.000		
			1.3. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	- Jumlah pelatihan pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan - Jumlah lomba pemanfaatan pekarangan		kali	4	2	201.060.000	2	210.000.000	2	215.000.000	2	218.000.000	2	220.000.000	12	1.064.060.000		
			1.4. Kegiatan Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan	- Jumlah kelompok mandiri pangan yang dibina		kelompok	2	2	58.235.000	3	75.000.000	3	75.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	378.235.000		
			1.5. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Jumlah paket sembako yang tersedia		paket	50	50	27.374.800	0	0	0	0	0	0	0	0	50	27.374.800		
			1.6. Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan	- Jumlah dokumen NBM (Neraca Bahan Makanan) dan buku database ketahanan pangan		dokumen	2	2	12.700.000	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	2	46.585.000	10	175.135.000		
			1.7. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	- Jumlah pelatihan/ pertemuan pengolahan pasca panen pengolahan hasil pertanian		orang	10	10	110.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	110.420.000		
			1.8. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	- Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida		kali	4	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20.000.000		
			1.9. Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertahanan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	- Jumlah Perda LP2B yang dihasilkan		perda	1	1	138.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138.850.000		
			1.10. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	- Jumlah Ranperda/ Perwako yang disusun - Jumlah cadangan pangan pemerintah		dokumen	1	1	36.727.500	0	75.000.000	0	85.000.000	0	0	0	0	1	196.727.500		
			1.11. Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Suplay Pangan	- Jumlah buku pola pangan harapan yang disusun		buku	0	0		20	15.000.000	20	16.000.000	20	17.500.000	20	19.100.000	80	67.600.000		
			1.12. Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	- Jumlah pelatihan yang dilakukan - Jumlah Kekturbertan HPS Tk. Provinsi dan Tk. Nasional		kali	2	2	203.800.000	2	203.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	10	1.015.800.000		
			1.13. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	- Jumlah pemantauan harga pangan pokok Kota Padang Panjang		kali	104	104	10.612.500	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	488	50.612.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi			
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan			- Produksi Susu Sapi	Jumlah produksi susu sapi/ tahun	liter/tahun		395.000		414.000		412.000		450.000		468.000		468.000							
				- Pendapatan Pembudidaya Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	Rp/Th/RTP		17.222.000		18.083.100		18.987.255		19.936.618		20.913.449		20.913.449		20.913.449					
				- Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun	ton		6.634		6.750		6.983		7.216		7.448		7.448		7.448					
				- Persentase Terbentuknya Kluster Tanaman Hias	progres tahapan pembentukan kluster tanaman hias: - Tahap 1 (5%) = Perencanaan - Tahap 2 (25%) = Penyediaan sarana dan prasarana - Tahap 3 (50-75%) = Lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya kluster tanaman hias	%		5		25		50		75		100		100		100					
				2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	- Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Jumlah benih ditebar dibagi jumlah panen	ton	720,64	650	590.609.000	680	614.195.360	700	641.082.374	720	670.405.669	750	703.421.896	750	3.219.714.299				
						- Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan (operasional BBI)	jenis	6	114.500.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6	140.000.000	6	150.000.000	6	654.500.000					
						DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah bidang DAK yang dilaksanakan	bidang	1	400.409.000	1	416.425.360	1	433.082.374	1	450.405.669	1	468.421.896	1	2.168.744.299					
						Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	kali	3	75.700.000	3	77.770.000	3	78.000.000	3	80.000.000	3	85.000.000	3	396.470.000					
				3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	- Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan		tahun	1	1.783.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.783.728.000					
						3.1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah keikutsertaan Florikultura	kali	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000					
							DAK Bidang Pertanian	Jumlah DAK Bidang Pertanian	bidang	1	1.713.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.728.000					
				4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	- Produksi Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias	tangkai	71.548	73.847	0	76.062	3.013.414.400	79.105	2.540.382.192	83.060	2.988.793.213	87.213	2.678.946.839	87.213	11.221.536.644				
						- Produktivitas Padi	Jumlah produksi/ luas panen	ton/ ha	6,42	5,7		5,8		6,2		6,3		6,4		6,4					
						- Luas Lahan Pertanian Organik	Luas lahan yang menggunakan sistem budidaya pertanian secara organik yang diakui oleh lembaga sertifikat organik (bersertifikat)	ha	9,7	9,7		10,7		11,7		11,7		12,7		12,7					
				4.1	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jumlah labor kultur jaringan yang beroperasi		unit	0	0	0	1	420.000.000	1	235.000.000	1	165.000.000	1	240.000.000	4	1.060.000.000				
						- Jumlah pembibitan tanaman hias yang dilaksanakan		ha	0	0	0	1		1		1		1	4						
						- Jumlah pengembangan pertanian organik yang dilaksanakan		ha	0	0	0	1		1		0		1	3						
				4.2	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pertanian	- Jumlah pemudu peserta pelatihan operator alat		oh	0	0	0	30	20.000.000	30	23.000.000	30	27.000.000	30	30.000.000	120	100.000.000				
				4.3	Kegiatan Pengembangan Pertanian/Perkebunan	- Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan		kali	0	0	0	2	174.000.000	2	184.000.000	2	194.000.000	2	196.000.000	8	748.000.000				
						- Jumlah peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)		oh	0	0	0	20		20		20		20	80						
						- Jumlah sarana proteksi tanaman		jenis	0	0	0	2		2		2		2	8						
				4.4	Kegiatan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah peserta pelatihan teknologi hasil yang dilaksanakan		orang	0	0	0	13	600.000.000	13	200.000.000	13	600.000.000	13	100.000.000	52	1.500.000.000				
		- Jumlah tanah yang disewa, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman hias		klaster	0	0	0	1		1		1		1	1										
		- Jumlah pengadaan sarana prasarana pengembangan komoditi tanaman hias (demplot tanaman hias)		jenis	0	0	0	3		3		0		0	3										
		- Jumlah festival dan parade bunga		kali	0	0	0	0		0		1		0	1										
4.5	DAK Bidang Pertanian	- Jumlah DAK Bidang Pertanian		bidang	1	0	0	1	1.799.414.400	1	1.898.382.192	1	2.002.793.213	1	2.112.946.839	1	7.813.536.644								
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	- Persentase penurunan penyakit ternak/ hewan		%	5	307.565.000	7	338.321.500	7	338.321.500	9	372.153.650	10	409.369.015	10	1.765.730.665									
5.1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	- Jumlah pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies		Jenis	100	307.565.000	100	338.321.500	100	338.321.500	100	372.153.650	100	409.369.015	100	1.765.730.665									
		- Jumlah pemeriksaan hewan qurban		ekor	700			650		660		655		650	3315										
		- Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)		ekor	170			160		150		170		190	840										
		- Jumlah uji sampel		sampel	192			200		200		200		200	992										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi	
								2019		2020		2021		2022		2023		2020					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				- Jumlah Penanggulangan Ganguan Reproduksi		ekor		90		70		50		50		50		310					
				- Jumlah vaksinasi HPR		ekor		1400		1500		1400		1400		1400		7100					
				- Jumlah pengobatan, pelayanan ternak/ hewan		pelayanan		950		985		995		1000		1010		4940					
				- Jumlah Kasus Zoonosis		kasus		3		2		1		0		0		6					
			6	Program Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	- Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/ Produk Peternakan	Jumlah produksi peternakan tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali seratus persen	%	4	5	1.973.464.300	6	1.588.708.100	7	1.468.537.290	8	1.239.883.561	9	1.255.895.205	9	7.526.488.456			
			6.1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	- Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal	produk		1	813.009.000	1	731.708.100	2	658.537.290	3	592.683.561	3	533.415.205	10	3.329.353.156				
					- Jumlah bibit ternak sapi perah pada rearing unit	ekor		50		40		25		20		15		150					
					- Jumlah kelahiran ternak hasil IB	ekor		210		250		280		290		310		1340					
					- Jumlah sapi pembibitan	ekor		11		2		2		2		2		19					
			6.2	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	- Jumlah kk miskin yang dibantu	kk		14	457.395.300	0	0	0	0	0	0	0	0	14	457.395.300				
			6.3	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	- Jumlah pusat agribisnis peternakan	unit		1	87.800.000	1	487.000.000	1	699.000.000	1	377.200.000	1	382.480.000	1	2.033.480.000				
					- Jumlah Livestock Expo yang diikuti	kali		1		1		1		1		1		5					
					- Jumlah pelaksanaan tuan rumah livestock Expo Tingkat Provinsi	kali		0		0		1		0		0		1					
					- Festival susu	kali		0		1		1		1		1		4					
			6.4	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	- Jumlah sarana dan prasarana peternakan	unit		2	615.260.000	3	370.000.000	2	111.000.000	2	270.000.000	3	340.000.000	12	1.706.260.000				
					- Jumlah sertifikasi produk susu	produk		3		2		1		1		1		8					
					- Jumlah tugu sapi perah/ susu	unit		0		2		2		0		0		4					
					- Penyediaan lahan abadi peternakan	ha		0		0		2		0		0		2					
2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan			- Angka Kemiskinan	Dihitung dengan membagi Jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan diwilayah tertentu	%		6,17	5,45		5,03		4,6		4,18		3,75		3,75				
				- Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ dimana: P _i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke i Nilai gini rata-rata berkisar antara 0 dan 1, jika G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang	Indeks		0,3	0,28		0,27		0,26		0,25		0,24		0,24				
			1	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	- Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan) kali 100 persen	%		2		8		10		11		12		12				
			1.1	Program Pembudayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian	- Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak di sektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	Persentase masyarakat miskin yang bergerak di sektor pertanian menerima bantuan pertanian	%		18	35	0	47	500.110.000	65	500.110.000	82	500.110.000	90	500.110.000	90	2.000.440.000		
				Pendistribusian Bibit Ternak pada Masyarakat	- Jumlah KK miskin yang dibantu	kk		0	0	15	500.110.000	15	500.110.000	15	500.110.000	15	500.110.000	74	2.000.440.000				
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	rupiah		10,24	10,29		10,31		10,34		10,36		10,39		10,39				
			1	Meningkatnya Pendapatan Petani	- Persentase peningkatan pendapatan petani	Kenalkan 10 persen dari pendapatan petani/tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi	%		10		20		30		40		50		50				
			1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Persentase cakupan Pembinaan kelembagaan Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelembagaan tani yang aktif dibagi jumlah seluruh kelembagaan yang terdaftar dikali seratus persen	%		45,45	56,06	74.999.800	66,67	206.874.795	76,77	160.046.665	88,89	162.047.831	100	170.252.615	100	774.221.706		
			1.1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	- Jumlah penilaian kelompok tani berprestasi	kelompok		3	74.999.800	3	126.874.795	3	80.046.665	3	82.047.831	3	90.252.615	15	454.221.706				
					- Jumlah peserta pertemuan kelompok tani	oh		1000		1500		2000		2500		3000		10000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				- Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional di Padang		kali		0		1		0		0		0		1				
				- Jumlah fieldday kelembagaan tani		kali		0		1		1		1		1		4				
			1.2	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna	- Jumlah teknologi yang akan diterapkan			0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000			
				- Jumlah fieldday penerapan pertanian teknologi tepat guna		kali		0		1		1		1		1		4				
			1.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDN Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	- Jumlah Temu teknis penyuluh			0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000			
				- Jumlah pelatihan budidaya pertanian		kali		0		1		1		1		1		4				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	100	100	2.624.989.400	100	2.642.919.840	100	2.886.984.824	100	3.155.456.307	100	3.450.774.937	100	14.761.125.308		
			1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai		buah	1000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	4.500.000			
			1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan		tagihan	96	198.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96	198.220.000			
			1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		unit	54	545.126.900	61	490.614.210	61	539.675.631	61	593.643.194	61	653.007.514	61	2.822.067.449	Dinas Pangan dan Pertanian	Kota Padang Panjang	
			1.4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	- Jumlah tenaga kebersihan		orang	28	620.524.000	7	682.576.400	7	750.834.040	7	825.917.444	7	908.509.188	7	3.788.361.072			
			1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		jenis	50	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	53.500.000			
			1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopi yang disediakan		jenis	10	61.279.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	61.279.500			
			1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		oh	1350	87.500.000	1800	78.750.000	2475	86.625.000	2723	95.287.500	2995	104.816.250	11343	452.978.750			
			1.8	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		oh	295	485.725.000	295	437.152.500	295	480.867.750	295	528.954.525	295	581.849.978	1.475	2.514.549.753			
			1.9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	- Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran yang diupayakan		orang	28	553.114.000	37	608.425.400	37	669.267.940	37	736.194.734	37	809.814.207	37	3.376.816.281			
			1.10	Penyediaan komponen instalasi	- Jumlah komponen listrik yang tersedia		jenis	10	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15.500.000			
			1.11	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	- Jumlah materai		buah	0	0	1000	133.231.330	1000	146.149.463	1000	160.359.410	1000	175.990.350	4000	615.730.553			
				- Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopi yang disediakan		jenis	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
				- Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		jenis	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
				- Jumlah Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun		laporan	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12				
				- Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, LKJP, LKPD, LKPD, SPN, DAK, pengukuran kinerja, laporan realisasi kegiatan fisik dan keuangan belanja modal/ pengadaan barang dan jasa		laporan	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	56				
			1.12	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	- Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan		tagihan	0	0	96	212.170.000	96	213.565.000	96	215.099.500	96	216.787.450	384	857.621.950			
				- Jumlah komponen listrik yang tersedia		jenis	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		%	100	100	153.434.000	100	344.590.600	100	578.049.660	100	383.854.626	100	422.240.089	100	1.882.168.975		
			2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas	- Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia		unit	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000			
			2.2	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah rehab gedung kantor yang dilaksanakan		unit	0	0	2	90.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	5	370.000.000			
			2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara		unit	7	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65.000.000			
			2.4	Persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	- Jumlah sertifikat tanah pemerintah daerah yang diproses		sertifikat	1	15.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000			
			2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala	- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		jenis	4	73.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	73.434.000			
			2.6	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		jenis	0	0	10	234.590.600	10	258.049.660	10	283.854.626	10	312.240.089	10	1.088.734.975			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		20				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				- Jumlah gedung kantor yang dipelihara		unit		0		7		7		7		7		7				
				- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		jenis		0		4		4		4		4		4				
			3	Program peningkatan disiplin aparatur	- Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	%	90	90	0	90	116.400.000	90	0	90	140.844.000	100		0	100	257.244.000		
			3.1	Pengadaan Pakelan Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya	- Jumlah pakelan dinas yang disediakan	jenis		0	0	2	116.400.000	0	0	2	140.844.000	0		0	4	257.244.000		
			4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	50.000.000	100	45.000.000	100	51.750.000	100	59.512.500	100	68.439.375	100	274.701.875			
			4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah aparatur mengikuti bintek	orang		8	50.000.000	10	45.000.000	12	51.750.000	14	59.512.500	16	68.439.375	60	274.701.875			
			5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan dan disampaikan tepat waktu	%	100	100	799.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	799.800		
			5.1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja OPD, Renja, LKIP, LKPI, LPPD, SPIP, Pevetapan Kinerja	laporan		12	499.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	499.900		
			5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	laporan		8	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	299.900		
TOTAL									8.441.894.100		10.098.534.595		9.882.764.505		10.323.911.357		10.318.134.971		49.065.239.528			

2. RENSTRA PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung-jawab	Lokasi	
								2019		2020		2021		2022		2023		20					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			5	Prevalensi stunting	Persentase anak balita yang tinggalnya dibawah ketegangan rata-rata penduduk acuan	%		19,5		17,03		13		15,51		17		13,98		21	22	
			1	Menurunnya prevalensi stunting dari sektor ketahanan pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan	index	85	85		85,25		85,5		85,75		86,00		86				
			1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan energi	%	97,8	0	0	0	0	100	40.781.600	100	312.507.168	100	347.787.500	100	701.076.268			
					- Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	Banyaknya protein yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan protein	%	104	0		0		100		100		100		100				
			1.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	Kkal/kap/hr	2812,12	0	0	0	0	2.400		2.400		143.312.500	2.400	146.937.500	2.400	290.250.060			
			1.1.1	Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen		0	0	0	0	2		0	39.442.560	0	33.442.500	2	72.885.060				
					- Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dicetak	Banyaknya Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dicetak	Buku		0		0	10		10		10		10		20			
					- Jumlah Buku Analisis Harga Pangan yang dicetak	Banyaknya Buku Analisis Harga Pangan yang dicetak	Buku		0		0	10		10		10		10		0			
					- Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat/Bidang/ Program/ Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah tenaga harian lepas yang melaksanakan tugas administrasi pada Bidang Ketahanan Pangan	Orang		0		0	1		1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1.1.2 Sub. Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan yang dilaksanakan	Banyaknya pelatihan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan	Kali		0	0	0	0	0	0	2	93.375.000	2	73.000.000	4	166.375.000		
				- Jumlah Lomba Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah lomba pemanfaatan pekarangan dimana lomba pemanfaatan pekarangan merupakan lomba. Lomba pemanfaatan pekarangan merupakan perlombaan yang menilai keaktifan dan inovasi kelompok tani/kelompok wanita tani/dasawisma dalam memanfaatkan lahan pekarangannya untuk sumber pangan.	kali		0		0		0		1		1		2			
			1.1.3 Sub. Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang	Jumlah pemantauan dinamika harga pangan pokok di tingkat petani (produsen) maupun di tingkat pedagang (distributor) dalam rentang waktu tertentu yang dilakukan oleh petugas pemantau harga.	Kali		0	0	0	0	0	0	350	10.495.000	350	10.495.000	700	20.990.000		
				- Jumlah Buku Analisis Harga Pangan	Banyaknya buku analisis harga pangan dimana buku tersebut merupakan publikasi hasil kompilasi data harga pangan pokok/strategis tingkat produsen maupun di tingkat distributor yang bersumber dari pendataan oleh petugas pemantau harga pangan	Buku		0		0		0		10		10		20			
			1.1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	- Jumlah Outlet Toko Tani Indonesia	Banyaknya Outlet Toko Tani Indonesia yang menyediakan komoditas pangan untuk dijual kepada konsumen.	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000		
			1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Cadangan Beras Pemerintah Kab/ Kota (CBPK) = 80% x cadangan beras total provinsi x Rasio jumlah penduduk Kab/ Kota terhadap jumlah penduduk provinsi	Kg	N/A	0	0	0	0	0	0	3.000	33.000.000	5.000	115.000.000	8.000	148.000.000		
			1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	Banyaknya rapat/pertemuan yang membahas mengenai koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengendalian cadangan pangan pemerintah	kali		0	0	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000		
			1.2.2 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Banyaknya persediaan pangan (beras) dalam jumlah tertentu yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.	Kg		0	0	0	0	0	0	3.000	33.000.000	7600	80.000.000	10.600	113.000.000		
			1.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan/ Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	- Angka Kecukupan Energi (AKE)	Ketersediaan energi dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu	kkal/ kapita/ hari	2161,9	0	0	0	1.824,60	40.781.600	1.840,00	136.194.608	1.845,00	85.850.000	1.845,00	262.826.208			
				- Angka Kecukupan Protein (AKP)	Ketersediaan protein dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu	gram/ kapita/ hari	62,64	0	0	0	55,00		56,00		57,00		57				
			1.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/ Tahun	- Jumlah Buku Pola Pangan Harapan yang disusun	Banyaknya Buku Pola Pangan Harapan yang disusun	Buku		0	0	0	20	5.200.000	10	17.650.000	10	5.850.000	40	28.700.000			
			1.3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Pelatihan yang dilakukan	Banyaknya pelatihan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat (kali)	Kali		0	0	0	1	35.581.600	2	118.544.608	2	80.000.000	5	234.126.208			
				- Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Provinsi	Banyaknya keikutsertaan pada kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Tingkat Provinsi Sumatera Barat (kali)	Kali		0	0	0	0		1		1		2				
				- Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Nasional	Banyaknya keikutsertaan pada kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Tingkat Nasional Sumatera Barat (kali)	Kali		0	0	0	0		1		1		2				
				- Jumlah Petugas Pengelola Toga	Jumlah THL. Pengelola Tanaman Obat Keluarga	Orang		0	0	0	0		1		1		1				
			2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Persentase Penanganan Kasus Rawan Pangan	Jumlah kasus rawan pangan yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali 100%	%	N/A	0	0	0	0	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000			
			2.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Kasus Rawan Pangan	Jumlah Kasus Rawan Pangan per tahun	kasus		0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				- Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias (berdasarkan SK Gubernur)	%		0		0		50		100		100		100				
			5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	Jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun berjalan dikurangi jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	%		0	0	0	0	3	931.980.300	5	564.296.600	7	565.000.000	7	2.061.276.900		
			5.1	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Produksi Perikanan	Total berat produksi dalam ton yang dihasilkan dari budidaya air tawar dan perairan umum	Ton/ Tahun	720	0	0	0	0	700	931.980.300	735	564.296.600	750	565.000.000	750	2.061.276.900		
			5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	- Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang disediakan	Banyaknya sarana dan prasarana perikanan yang disediakan untuk operasional kegiatan penbenihan di UPTD Balai Benih Ikan	Jenis		0	0	0	0	6	842.980.300	6	564.296.600	6	485.000.000	6	1.892.276.900		
					- Jumlah Tenaga Penunjang Operasional BBI	Jumlah THL UPTD BBI	Orang		0	0	0	0	7		7		7		7			
					- Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Peruluh Pertanian serta UPTD BBI)	Jumlah THL Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan	Orang		0	0	0	0	3		3		3		3			
			5.1.2	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	- Jumlah Pelaksanaan DAK	Banyaknya kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan		0	0	0	0	1	89.000.000	0	-	1	80.000.000	1	169.000.000		
			6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Pendapatan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan dikali harga jual ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidayaan Ikan)	Rupiah/ Tahun/ RTP	20.224.719	0	0	0	0	18.987.255	20.073.450	19.936.618	80.000.000	20.933.449	54.128.710	20.933.449	154.202.160		
			6.1	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Banyaknya kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di tingkat Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun	Kali		0	0	0	0	1	20.073.450	3	80.000.000	3	54.128.710	7	154.202.160		
			6.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	- Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Banyaknya kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di tingkat Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun	Kali		0	0	0	0	1	20.073.450	3	80.000.000	3	54.128.710	7	154.202.160		
					- Jumlah Data Profile Perikanan Kota Padang Panjang	Banyaknya Publikasi mengenai profil pengembangan perikanan di Kota Padang Panjang	Dokumen		0	0	0	0	1		1		1		3			
					- Sosialisasi gemarikan	Banyaknya sosialisasi gerakan makan ikan di Kota Padang Panjang dalam satu tahun	Kali		0	0	0	0	0		0		0		0			
			7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang disediakan dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana pertanian yang dibutuhkan adalah sarana pra panen (tractor, cultivator, mesin potong rumput, pompa air); panen (thresher); dan pasca panen (saler, kemasan, oven)	%	N/A	0	0	0	0	62,5	548.104.200	75	917.995.500	87,5	421.700.000	87,5	1.887.799.700		
					- Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	Jumlah sarana peternakan yang disediakan dibagi jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan adalah mesin potong rumput, bibit ternak,	%	N/A	0	0	0	0	50		75		100		100			
			7.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia dalam satu tahun	Jenis		0	0	0	0	2	22.000.000	2	41.600.000	2	21.700.000	2	85.300.000		
			7.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kali		0	0	0	0	12	22.000.000	12	41.600.000	12	21.700.000	36	85.300.000		
					- Jumlah Peserta Pelatihan Operator Alsintan (Pemuda)	Jumlah Peserta Pelatihan Operator Alsintan (Pemuda)	Orang		0	0	0	0	30		30		30		60			
			7.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Produksi Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias	Tangkal	71.548	0	0	0	0	79.105	75.571.200	83.060	285.000.000	87.213	100.000.000	87.213	460.571.200		
					- Produksi Padi	Jumlah produksi padi/ tahun	Ton	6,42	0	0	0	0	6.983		7.216		7.448		7.448			
					- Luas Lahan Pertanian Organik	Luas lahan yang menggunakan sistem budidaya pertanian secara organik yang diakui oleh lembaga sertifikat organik (bersertifikat)	Ha	9,7	0	0	0	0	1		1		1		1			
			7.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	- Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasi	Banyaknya laboratorium dalam satuan unit yang didefinisikan sebagai tempat atau ruang untuk melakukan praktik penelitian Kultur Jaringan tanaman yang beroperasi	Unit		0	0	0	0	1	75.571.200	1	285.000.000	1	100.000.000	1	460.571.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				- Luas Lahan Pembibitan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	Ukuran suatu bidang dalam satuan hektar yang digunakan untuk pembibitan tanaman hias	Ha		0		0		0		1		1		1			
				- Jumlah Pengembangan Pertanian Organik yang Dilaksanakan	Ukuran luas lahan dalam hektar yang digunakan untuk budidaya tanaman secara organik	Ha		0		0		0		0		1		1			
				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Hasil yang Dilaksanakan	Banyaknya orang yang mengikuti pelatihan teknologi hasil pertanian yang diadakan oleh pemerintah	Orang		0		0		0		0		13		13			
				- Jumlah Peserta Pelatihan Tanaman Hias yang Dilaksanakan	Banyaknya orang yang mengikuti pelatihan budidaya tanaman hias yang diadakan oleh pemerintah	Orang		0		0		0		0		30		30			
				- Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dilaksanakan	Banyaknya orang yang mengikuti pelatihan budidaya tanaman dan pengolahan hasil pertanian yang diadakan oleh pemerintah	Orang		0		0		0		20		20		40			
				- Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan	Banyaknya orang yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional screen house (struktur bangunan yang melindungi tanaman dari gangguan gangguan hama, penyakit dan terpaan angin berlebih) serta operasional laboratorium kultur jaringan yang ada pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	Orang		0		0		0		2		2		4			
				- Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Petugas Administrasi Bidang TMRP)	Banyaknya orang yang melaksanakan tugas pokok pengadministrasian kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pangan dan Pertanian	Orang		0		0		0		1		1		1			
				- Jumlah Peserta Studi Komparatif ke Daerah Potensi Pertanian	Banyaknya orang yang ikut serta dalam study komparatif ke daerah lain yang diadakan oleh pemerintah	Orang		0		0		0		10		10		20			
			7.3	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan dalam satu tahun	Ekor	44	0	0	0	19	450.533.000	16	591.395.500	10	300.000.000	10	1.341.928.500		
				- Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal	Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal dalam satu tahun	produk	109	0		0		1		2		2		2			
			7.3.1	Sub Kegiatan Penguasaan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	- Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan dalam satu tahun	Ekor	0	0	0	0	19	450.533.000	16	591.395.500	10	300.000.000	10	1.341.928.500		
				- Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal	Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal dalam satu tahun	Produk	0			0		1		2		2		2			
				- Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	Jumlah tenaga kerja yang bertugas melakukan kegiatan pembibitan sapi perah di kandang pembibitan Kota Padang Panjang	orang	0			0		0		4		4		4			
				- Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	Banyaknya orang yang bertugas sebagai pengawas mutu pakan ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	orang	0			0		0		1		1		1			
			8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana pertanian yang dibutuhkan adalah jalan usaha tani, irigasi. Jumlah prasarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan adalah irigasi, kandang, RPH, puskesmas	%	N/A	0	0	0	50	150.700.000	100	604.041.800	100	678.000.000	100	1.432.741.800		
			8.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Luas Lahan LP2B	Ha	-	0	0	0	0	0	147,05	18.000.000	147,05	15.000.000	147,05	33.000.000		
			8.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LK2B	- Jumlah peserta sosialisasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Banyaknya orang yang mengikuti sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Orang	0	0	0	0	0	0	350	18.000.000	350	15.000.000	700	33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			8.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	- Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dalam Satu Tahun	Unit		0	0	0	0	0	2	572.046.800	2	650.000.000	4	1.358.746.800					
				- Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun	Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun dalam Satu Tahun	Jenis		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1					
				- Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan dalam Satu Tahun	Unit		0	0	0	0	3	0	1	3	3	3	3	3					
				- Tugu Ikon Kota Padang Panjang	Jumlah Tugu Ikon Kota Padang Panjang	Tugu		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2					
			8.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	- Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Paket		0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	50.000.000	2	60.000.000					
				- Jumlah Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Paket		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2					
				- Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan	Orang		0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150					
				- Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2					
			8.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun	Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun	Ruas		0	0	0	0	0	1	435.000.000	1	200.000.000	2	635.000.000					
				- Jumlah ruas jalan produksi yang dibangun	Jumlah ruas jalan produksi yang dibangun	Ruas		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1					
			8.2.3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	Banyaknya sarana dan prasarana peternakan dalam satuan unit	Unit		0	0	0	3	136.700.000,00	1	127.046.800	3	400.000.000	3	663.746.800					
				- Jumlah Tugu Ikon Kota Padang Panjang (Tugu Sapi Perah)	Banyaknya tugu yang dijadikan Ikon Kota Padang Panjang	Tugu		0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2					
				- Jumlah Ruang Rawat Inap di Puskesmas	Banyaknya ruang rawat inap hewan pada UPTD Puskesmas	Unit		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1					
				- Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang/ Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)	Banyaknya jumlah THL yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pada Bidang/ Peternakan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH	Orang		0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3					
			8.3	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah	- Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit dan kandang pembibitan	Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit dan pembibitan dalam satu tahun	Ekor	44	0	0	0	19	14.000.000	16	13.995.000	10	13.000.000	10	40.995.000					
				- Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB dalam satu tahun	Ekor	109	0	0	0	50	50	50	50	75	75	75	175	175					
			8.3.1	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	- Jumlah Bibit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit dan kandang pembibitan	Banyaknya anak sapi perah yang dipelihara pada Rearing Unit pada satu waktu tertentu	Ekor		0	0	0	19	14.000.000	16	13.995.000	10	13.000.000	10	40.995.000					
				- Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Banyaknya anak sapi yang lahir dari proses insemiasi buatan (IB) dalam satu tahun	Ekor		0	0	0	50	50	50	50	75	75	75	175	175					
			9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	Jumlah Kasus penyakit hewan/ ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen	%	-	0	0	0	7	368.328.550	7,5	693.133.038	8	549.679.150	8	1.611.140.738					
			9.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Pelayanan Medis Veteriner	Jumlah masyarakat peternak/pemilik hewan yang minta dilayani dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pelayanan yang dapat dilakukan di kali seratus persen	%	100	0	0	0	100	230.789.150	100	246.998.650	100	218.552.350	100	696.340.150					
			9.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Jumlah Kasus Zoonosis yang ditemukan	Jumlah Kasus Zoonosis yang ditemukan	Kasus		0	0	0	1	112.236.800	1	116.916.800	1	100.000.000	1	329.153.600					
				- Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor		0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	105	105					
				- Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Banyaknya pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas maupun secara langsung di tempat pemeliharaan hewan (on the spot)	Pelayanan		0	0	0	995	995	995	995	1.000	1.000	2.990	2.990	2.990					
				- Jumlah Tenaga Teknis: Paramedis, Yankeswan dan PSDR	Banyaknya orang yang bertugas sebagai tenaga medis, paramedis, pelayan kesehatan hewan dan Participatory Disease Surveillance and Respon (PDSR)	Orang		0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
			9.1.2	Sub kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam	- Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	Banyaknya hewan penular rabies (HPR) yang ditangkap oleh petugas	Ekor		0	0	0	25	118.552.350	45	130.081.850	55	118.552.350	125	367.186.550					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Satu Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Jenis Pengadaan Obat-Obat Hewan dan Vaksin Rabies	Banyaknya jenis obat-obatan hewan dan vaksin rabies yang diadakan oleh pemerintah	Jenis	-	0	0	0	0	60	60	60	65	185						
				- Jumlah Hewan yang Divaksinasi Rabies	Banyaknya hewan yang mendapatkan layanan vaksinasi rabies oleh pemerintah	Ekor	-	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.300	3.700							
			9.2 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Jumlah Pasien yang dapat dilayani dalam satu tahun dibagi jumlah pasien yang datang ke PUSKESWAN di kali seratus	%	-	0	0	0	0	0	0	100	103.682.400	100	100.000.000	100	203.682.400			
			9.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Jumlah Jenis Sarana Pendukung Diagnosa Penyakit Hewan	Banyaknya jenis sarana yang digunakan untuk mendukung diagnosa penyakit hewan pada UPTD Puskeswan	Jenis	-	0	0	0	0	0	0	0	103.682.400	3	100.000.000	3	203.682.400			
				- Jumlah Sarana Pelayanan Keliling (Mobil Roda Empat/Ambulan hewan)	Banyaknya mobil roda empat/ambulan hewan yang digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan hewan secara mobile.	Unit	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1						
				- Jumlah Tenaga Teknis Medis Veteriner (Dokter Hewan)	Banyaknya orang yang bertugas sebagai tenaga medis veteriner/dokter hewan	Orang	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1						
				- Jumlah Tenaga Teknis Paramedis Veteriner (D3 Kesehatan Hewan)	Banyaknya orang yang bertugas sebagai tenaga paramedis veteriner	Orang	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
				- Jumlah Dana Pendamping Kementerian Pertanian		tahun	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1						
				- Jumlah Sarana Penunjang Ruang Ronggong/ X-Ray	Banyaknya sarana penunjang ruang ronggong/ x ray pada UPTD Puskeswan	paket	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
			9.3 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Jumlah Livestock Expo yang Dikuti	Jumlah Livestock Expo yang Dikuti dalam satu tahun	Kali	1	0	0	0	0	0	137.539.400	1	342.451.988	1	231.126.800	2	711.118.188			
				- Jumlah Sertifikasi Produk Susu	Jumlah Sertifikasi Produk Susu dalam satu tahun	Sertifikat	-	0	0	0	0	1	0	1	1	1						
			9.3.1 Sub kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Livestock Expo yang Dikuti	Banyaknya keluksertaan pemerintah daerah dalam kegiatan livestock expo dan kontes ternak dalam suatu waktu tertentu	Kali	-	0	0	0	0	0	22.000.000	1	138.125.188	1	105.000.000	2	265.125.188			
				- Jumlah Sertifikasi Produk Susu	Banyaknya sertifikasi produk olahan susu	Sertifikat	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1						
			9.3.2 Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Pemeriksaan Hewan Qurban	Banyaknya hewan qurban yang menjalani proses pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	-	0	0	0	0	600	115.539.400	600	204.326.800	600	126.126.800	1800	445.993.000			
				- Jumlah Uji sampel	Banyaknya uji yang dilakukan dalam satu tahun	Sampel	-	0	0	0	0	200	200	200	230	630						
				- Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator Hoist, Petugas Penyeimbang Hewan, Petugas Bongkar Muat Daging)	Banyaknya orang yang bertugas secara teknis terhadap kegiatan operasional UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	Orang	-	0	0	0	0	0	3	3	3	3						
			10 Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	- Persentase Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	Jumlah bencana pertanian yang dilangani dibagi dengan jumlah bencana pertanian yang terjadi dikali seratus persen	(%)	-	0	0	0	0	14%	15.084.000	27%	16.620.000	58,7%	52.000.000	58,7%	83.704.000			
			10.1 Kegiatan Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian kabupaten/ Kota	- Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Orang	15	0	0	0	0	0	15.084.000	0	16.620.000	20	52.000.000	20	83.704.000			
				- Jumlah Sarana Proteksi Tanaman yang Disediakan	Jumlah Sarana Proteksi Tanaman yang Disediakan	Jenis	-	0	0	0	0	2	0	0	2	2						
				- Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Ha	-	0	0	0	0	294,01	295	295	150	739,01						
			10.1.1 Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Banyaknya peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dimana SL-PHT SL-PHT merupakan suatu metode penyuluhan yang memadukan teori dan pengalaman petani dalam melakukan kegiatan usaha tani.	Orang	-	0	0	0	0	0	15.084.000	0	0	20	35.000.000	20	50.084.000			
				- Jumlah Sarana Proteksi Tanaman	Banyaknya sarana proteksi tanaman yang disediakan oleh pemerintah	Jenis	-	0	0	0	0	2	0	0	2	2						
			10.1.2 Sub kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Jumlah Sosialisasi AUTP	Banyaknya sosialisasi asuransi usaha tanaman padi (AUTP) yang diadakan oleh pemerintah daerah	Orang	-	0	0	0	0	0	0	150	16.620.000	150	17.000.000	300	33.620.000			
				- Jumlah Premi Asuransi AUTP	Jumlah Premi Asuransi AUTP	Ha	-	0	0	0	0	0	0	295	295	295						
2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan			- Angka Kemiskinan	Dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk keseluruhan di wilayah tertentu	%	6,17	0	0	0	0	4,6	4,18	3,75	3,75							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				- Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{k=1}^K P_k (Q_k + Q_k - 1)$ dimana: P _k : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke 1 Q _k : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-1 Nilai gini rata-rata berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang		0,3	0		0		0	0,26		0,25		0,24		0,24			
	1 Meningkatkan Pendapatan Petani Penerima Bansos			- Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100%		0	0	0	0	0	10		11		12		12				
			1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	- Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	Jumlah sarana peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	(%)		0	0	0	0	0	0	65		312.000.000	70	200.000.000	70	512.000.000		
			1.1 Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Jumlah KK Miskin yang Dibantu	Jumlah KK Miskin yang Dibantu dalam satu tahun	KK	17	0	0	0	0	0	0	2		312.000.000	8	200.000.000	10	512.000.000		
			1.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	- Jumlah KK Miskin yang Dibantu		KK		0	0	0	0	0	0	2		312.000.000	8	200.000.000	10	512.000.000		
	3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	Rupiah	10,24	0	0	0	0	10,34		10,36		0	10,39	0	10,39			
	1 Meningkatkan Pendapatan Petani			- Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padri) /jahan/na, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya			0	0	0	0	30		40		50		50				
			1 Program Penyuluhan Pertanian	- Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	Penerapan inovasi dibidang teknologi budidaya Masyarakat (jumlah kelompok yang menerapkan inovasi dibagi total jumlah kelompok tani)	%	N/A	0	0	0	0	59,00	36.215.950	67,80		383.230.000	100,00	170.575.517	100,00	590.021.467		
			1.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan dalam Satu Tahun	Kelompok	N/A	0	0	0	0	20	36.215.950	20		383.230.000	19	170.575.517	59	590.021.467		
			1.1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi	Banyaknya kegiatan penilaian kelompok tani berprestasi	Kelompok		0	0	0	0	0	24.100.950	0		333.230.000	3	129.575.517	3	486.906.467		
				- Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani	Banyaknya orang yang termasuk ke dalam peserta pertemuan kelompok tani	Orang		0	0	0	0	500		250		2500		2500		3250		
				- Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional	Banyaknya kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Tani di tingkat nasional yang diikuti	Kali		0	0	0	0	0		1		1		1		2		
				- Jumlah Field Day Kelembagaan Tani	Banyaknya field day kelembagaan tani yang merupakan kegiatan temu lapang bersama anggota kelompok tani petani, penyuluh dan aparat pemerintah untuk bersinergi dalam hal usahatani pertanian.	Kali		0	0	0	0	0		1		1		1		2		
			1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Jenis Teknologi yang akan diterapkan	Banyaknya jenis teknologi pertanian yang diterapkan oleh petani dalam satu tahun	Jenis		0	0	0	0	1	12.115.000	2		50.000.000	2	41.000.000	2	103.115.000		
				- Jumlah Fieldday Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna	Banyaknya field day penerapan pertanian teknologi tepat guna yang merupakan kegiatan temu lapang bersama anggota kelompok tani petani, penyuluh dan aparat pemerintah untuk bersinergi dalam hal usahatani pertanian terutama terkait penerapan teknologi pertanian tepat guna	Kali		0	0	0	0	0		0		0		1		1		
				- Jumlah Training Penyuluh Pertanian	Banyaknya training atau pelatihan bagi penyuluh pertanian dalam satu waktu tertentu untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyuluh pertanian	Kali		0	0	0	0	0		0		0		6		6		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				- Jumlah Temu Teknis Penyuluhan	Banyaknya Temu Teknis dalam satu waktu tertentu dimana temu teknis penyuluhan adalah kegiatan pertemuan berkala antar penyuluh pertanian, atau antara penyuluh pertanian, peneliti dan aparat pengatur dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usahatani	Kali		0		0		0		0		1		1				
			1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	%	90	0	0	0	0	90	9.139.302.859	90	8.630.661.995	90	8.911.700.000	90	34.022.768.354			
			1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan yang Tersedia	Laporan		0	0	0	0	14	569.900	0	0	0	0	14	569.900			
			1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan yang Tersedia	Laporan		0	0	0	0	14	569.900	0	0	0	0	14	569.900			
			1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	%	90	0	0	0	0	90	7.343.119.100	90	7.062.405.341	90	6.851.700.000	90	28.598.327.941			
			1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	bulan						14	7.341.103.500	0	0	0	0	14	7.341.103.500			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang						0	0	58	7.060.760.891	58	6.850.000.000	58	21.251.864.391			
			1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan		0	0	0	0	1	1.064.800	1	495.000	1	500.000	3	2.059.800			
			1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran yang disusun	Laporan		0	0	0	0	14	579.000	14	999.950	14	1.000.000	42	2.578.950			
			1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan		0	0	0	0	1	371.800	1	149.500	1	200.000	1	721.300			
			1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawalan	%	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	50.000.000	90	50.000.000		
			1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stel		0	0	0	0	0	0	0	0	110	50.000.000	110	50.000.000			
			1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	90	0	0	0	0	0	90	306.836.475	90	294.717.900	90	227.000.000	90	828.554.375		
			1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peniarangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Disediakan	Jenis		0	0	0	0	23	17.342.100	21	23.492.850	21	16.000.000	21	56.834.950			
			1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan pendukung penyediaan surat menyurat Jumlah alat kebersihan Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	Jenis jenis jenis		0	0	7	0	3	126.884.275	0	0	0	0	3	126.884.275			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Jenis		0	0	7	0	0	0	7	110.000.100	7	85.000.000	7	195.000.100			
			1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Jenis		0	0	0	0	3	38.626.750	3	37.226.750	3	16.000.000	3	91.853.500			
			1.4.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	Kali Kali		0	0	0	0	229	123.983.350	196	123.998.200	150	110.000.000	575	357.981.550			
			1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	0	0	0	0	0	0	0	100	60.000.000	100	510.000.000	100	570.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Defenisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	OPD	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450.000.000	1	450.000.000			
			1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	4	60.000.000	15	60.000.000	19	120.000.000			
			1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	%	90	0	0	0	90	896.474.834	90	709.215.354	90	859.000.000	90	2.464.690.188			
			1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	Jenis	0	0	0	0	0	0	3	4.000.000	3	4.000.000	3	8.000.000			
			1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Jenis	0	0	0	0	3	203.834.034	3	251.765.754	3	205.000.000	3	660.599.788			
			1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Orang	0	0	0	0	25	692.640.800	17	453.449.600	17	650.000.000	17	1.796.090.400			
			1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	90	0	0	0	90	592.302.550	90	504.323.400	90	414.000.000	90	1.510.625.950			
			1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	Unit	0	0	0	0	61	330.492.950	61	330.500.800	61	260.000.000	61	920.993.750			
			1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis jenis	0	0	0	0	6	66.809.600	0	-	0	-	6	66.809.600			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	0	0	0	0	0	-	7	66.822.600	7	54.000.000	7	120.822.600			
			1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	0	0	0	0	3	195.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	395.000.000			
			1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi tanah	- Jumlah sertifikat tanah yang tersedia	Jumlah sertifikat tanah yang tersedia	sertifikat	0	0	0	0	0	0	2	7.000.000	0	-	2	7.000.000			
TOTAL																						
								0	0	0	0	11.478.622.339	12.555.427.061	12.017.675.877	43.392.828.777							

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERUBAHAN RPJMD YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 - 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	KINERJA
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Skor Pola Pangan Harapan	index	-% AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 - Skor AKE = % AKE x Bobot - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan	80,20	85,60	85,50	85,75	86,00	86,00
1	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	%	Banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan energi	94,50	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	%	Banyaknya protein yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan protein	101,90	102,11	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penanganan Kasus Rawan Pangan	%	Jumlah Kasus Rawan Pangan yang Ditangani dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Persentase Pengawasan Pangan Segar	%	Jumlah jenis sampel pangan segar yang diuji dibagi jumlah jenis sampel pangan segar yang termasuk kewenangan pemerintah daerah (3 jenis) dikali seratus persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/ thn/ RTP	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	20.187.640	18.580.002	18.987.255	0,00	0,00	0,00
III	Angka Konsumsi Ikan	kg/ orang/ tahun	Jumlah ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk	0,00	0,00	0,00	35,00	36,00	36,00
1	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	%	Jumlah produksi tahun lalu dikali persentase target produksi tahun berjalan	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	7,00
2	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	rupiah/ tahun/ RTP	Jumlah produksi ikan dikali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 702 orang)	0,00	0,00	18.987.255,00	19.936.618,00	20.933.449,00	20.933.449,00
IV	Produksi Susu Sapi	liter/ tahun	Jumlah produksi susu sapi	396.720	326.206	293.687	0,00	0,00	293.687
V	Produktivitas Susu Sapi	liter/ ekor/ tahun	Rata-rata jumlah susu sapi	0,00	0,00	0,00	11,20	11,80	11,80
VI	Produksi Padi	ton	Jumlah produksi padi/ tahun	9.810,60	8.557	6.983	0,00	0,00	6.983
VII	Produktivitas Padi	ton/ ha	Jumlah produksi padi/ ha	0,00	0,00	-	6,30	6,40	6,40

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	
				2019	2020	2021	2022	2023	KINERJA	
VIII	Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	%	Progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias (%)	5,00	5,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
1	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	%	Jumlah sarana pertanian/ peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	0,00	62,50	75,00	87,50	87,50	
2	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%		0,00	0,00	50,00	75,00	100,00	100,00	
3	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%		Jumlah prasarana pertanian/ peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	%		0,00	0,00	50,00	75,00	100,00	100,00	
5	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	Jumlah bencana pertanian yang ditangani dibagi dengan jumlah bencana pertanian yang terjadi dikali seratus persen	0,00	0,00	14,00	27,00	58,70	58,70	
6	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	%	Jumlah Kasus penyakit hewan/ ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen	5,10	7,00	7,00	7,50	8,00	8,00	
IX	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	%	Pendapatan petani sebelum menerima bantuan dibagi pendapatan sesudah menerima bantuan dikali 100%	0,00	0,00	10,00	11,00	12,00	12,00	
1	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%	Jumlah sarana peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	0,00	10,00	50,00	75,00	100,00	100,00	
X	Meningkatnya Pendapatan Petani	%	Persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi	10,00	24,00	30,00	40,00	50,00	50,00	
1	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	%	Penerapan Inovasi dibidang teknologi budidaya Masyarakat (Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi dibagi total jumlah kelompok tani)	0,00	0,00	59,00	67,80	100,00	100,00	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 7 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah:
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran indikator produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/ tahun. Cara pengukuran produktivitas susu sapi adalah jumlah total produksi susu sapi dalam setahun dibagi dengan jumlah populasi sapi perah betina produktif
3. Cara pengukuran indikator produktivitas susu sapi adalah Rata-rata jumlah susu sapi dalam satu tahun.
4. Cara pengukuran indikator pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan kali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan).
5. Cara pengukuran indikator Angka Konsumsi Ikan adalah jumlah ketersediaan ikan dibagi jumlah penduduk dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran indikator produksi padi adalah jumlah produksi padi/ tahun.
7. Cara pengukuran produktifitas padi adalah produksi padi dalam setahun (ton) dibagi luas tanam padi (Ha).
8. Cara Pengukuran Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias adalah progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias:
 - a) Tahap 1 (5%) = perencanaan;
 - b) Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani; dan
 - d) Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias.

9. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos adalah Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
10. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis disusun sebagai arah pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Rancangan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dengan telah disusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Perubahan Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian visi misi Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, Desember 2021

**Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang**


ADE NAELITA ANAS, SP, MP
Pembina Utama Muda,
NIP. 19710520 199903 2 004